

## **ANALISIS KEUANGAN DAERAH UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN APBD DI KABUPATEN SIDOARJO**

**Deris Lilian Fisfia<sup>1</sup>, Dwi Ayu Ijayanti<sup>2</sup>, Eva Hany Fanida<sup>3</sup>, Melda Fadiyah  
Hidayat<sup>4</sup>**

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri  
Surabaya

Email: [25040674288@mhs.unesa.ac.id](mailto:25040674288@mhs.unesa.ac.id)<sup>1</sup>, [25040674291@mhs.unesa.ac.id](mailto:25040674291@mhs.unesa.ac.id)<sup>2</sup>,  
[evafanida@unesa.ac.id](mailto:evafanida@unesa.ac.id)<sup>3</sup>, [meldahidayat@unesa.ac.id](mailto:meldahidayat@unesa.ac.id)<sup>4</sup>

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target yang telah ditetapkan, serta menilai tingkat efisiensi dalam penggunaan anggaran belanja dan mengidentifikasi kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif melalui rumus: Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, serta Rasio Pertumbuhan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa rasio kemandirian berada pada rata-rata 81,73% dengan kategori delegatif. Rasio efektivitas berada di atas 100,00% setiap tahunnya, yang berarti kinerja pemerintah daerah sangat efektif. Rasio efisiensi menunjukkan nilai yang cenderung fluktuatif dan berada di sekitar 100,00%, yang menunjukkan bahwa pengelolaan belanja daerah belum efisien. Sementara itu, rasio pertumbuhan berada pada tren positif dengan rata-rata sebesar 14,06% menandakan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan yang cukup baik dalam meningkatkan pendapatan daerah.*

**Kata Kunci:** *Rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, PAD, kinerja keuangan daerah.*

### **Abstract**

*This study aims to determine the level of effectiveness in realizing Regional Original Revenue (PAD) within the established targets, as well as assess the level of efficiency in budget utilization and identify the regional government's ability to manage financial resources. The research method used is descriptive quantitative, using the following formulas: Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, and Growth Ratio. The results reveal that the independence ratio averages 81.73%, categorized as delegative. The effectiveness ratio is above 100.00% annually, indicating that regional government performance is highly effective. The efficiency ratio tends to fluctuate, hovering around 100.00%, indicating that regional expenditure management is inefficient. Meanwhile, the growth ratio is on a positive trend, averaging 14.06%,*

*indicating that regional governments have a significant capacity to increase regional revenue.*

**Keywords:** *Independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, growth ratio, PAD, regional financial performance.*

## **PENDAHULUAN**

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan pemerintah yang berisi alokasi sumber daya keuangan selama satu periode tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan sosial (Musgrave dan Musgrave, 2004). Dalam konteks desentralisasi fiskal Indonesia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan alat utama yang digunakan pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik dan pembangunan (Aithan et al., 2025). APBD dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat umum (Mardiasmo, 2018). Kinerja pengelolaan APBD tidak hanya didasarkan pada besarnya anggaran yang dibahas, tetapi juga pada seberapa baik anggaran tersebut terealisasi dalam hal mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat umum (Mahmudi, 2016). Oleh karena itu, penting untuk menganalisis kinerja keuangan daerah guna menentukan tingkat efisiensi, efektivitas, dan stabilitas keuangan pemerintah daerah (Halim, 2012). Kajian ini dapat dilakukan dengan menggunakan beragam indikator keuangan, seperti rasio efektivitas

pendapatan, rasio efisiensi pengeluaran, rasio kemandirian daerah, serta rasio pertumbuhan.

Sebagai salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama pada sektor industri, perdagangan, dan jasa (Hardini, 2017). Perkembangan ekonomi yang terjadi mendorong peningkatan kebutuhan akan pengelolaan keuangan daerah yang lebih optimal (Amsyah & Sudardi, 2025). Hal ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam mendukung pembangunan daerah. Namun demikian, upaya untuk mencapai kemandirian keuangan daerah tidak terlepas dari berbagai kendala. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi adalah tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Selain itu, kemampuan daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih perlu ditingkatkan, mengingat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah belum sepenuhnya dominan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat kemandirian keuangan daerah, karena mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal

(Handraini et al., 2024). Meskipun PAD menunjukkan tren peningkatan, pemerintah daerah masih perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kontribusinya terhadap total pendapatan daerah (Triarda & Damayanti, 2021). Selain itu, pengelolaan APBD juga dihadapkan pada tantangan lain, seperti belum optimalnya realisasi anggaran serta

ketidakseimbangan antara belanja operasional dan belanja pembangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah agar lebih efektif dan berkelanjutan. Fenomena tersebut dapat dilihat melalui data yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 1. PAD, Dana Transfer, dan Belanja Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023-2025**

| Tahun | PAD                  | Dana Transfer        | Belanja              |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2023  | 2.050.788.676.962,07 | 2.965.839.490.458,00 | 5.001.777.999.928,70 |
| 2024  | 2.353.387.157.089,76 | 2.979.896.625.006,00 | 5.251.342.990.301,47 |
| 2025  | 2.673.813.507.802,00 | 2.754.541.223.000,00 | 5.947.354.730.802,00 |

Sumber, Diolah penulis(2026) dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023-2025, BPKAD Kabupaten Sidoarjo (<https://bkpad.sidoarjokab.go.id>)

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023–2025, PAD menunjukkan trend pertumbuhan setiap tahun yang menyoroti upaya daerah pemerintah untuk memaksimalkan potensi pendapatan. Selain itu, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2025, transfer dana dari pemerintah pusat masih memainkan peran penting dalam struktur pendapatan daerah. Di sisi lain, pengeluaran secara keseluruhan di daerah tersebut mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahun. Peningkatan pengeluaran mencerminkan penanda pembangunan dan pelayanan publik, tetapi juga berpotensi menyebabkan ketidakseimbangan fisik jika tidak dilakukan secara efisien. Kondisi ini menyoroti perlunya evaluasi

komprehensif terhadap operasi keuangan daerah untuk memastikan bahwa peningkatan pendapatan dan profitabilitas menghasilkan manajemen keuangan yang efisien dan menyeluruh.

Sementara itu, total belanja daerah mengalami kenaikan yang cukup signifikan setiap tahun. Peningkatan belanja ini mencerminkan bertambahnya aktivitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, kenaikan belanja juga perlu diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang efisien agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan keuangan daerah. Oleh karena itu diperlukan analisis rasio keuangan untuk mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, serta kemampuan kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk

mengevaluasi kinerja keuangan daerah dengan tujuan menilai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan APBD di Kabupaten Sidoarjo. Melalui analisis terhadap struktur pendapatan dan belanja daerah, diharapkan dapat diukur seberapa baik pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya keuangan yang ada. Hasil analisis ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif terkait kinerja pengelolaan pengelolaan APBD di masa yang akan datang.

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk menganalisis kinerja keuangan daerah melalui pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023–2025. Metode deskriptif kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan

suatu fenomena atau kondisi secara sistematis dengan menggunakan data yang berbentuk angka sehingga dapat dianalisis secara statistik.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), laporan realisasi anggaran, serta publikasi resmi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo dan sumber literatur lainnya yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dokumen berupa laporan keuangan daerah, data PAD, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**  
**Rasio Kemandirian**

**Tabel 5. Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023-2025**

| Tahun            | Realisasi PAD        | Realisasi Pendapatan Transfer | Rasio Kemandirian (%) | Kriteria     |
|------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|
| 2023             | 2.050.788.676.962,07 | 2.965.839.490.458,00          | 69,15                 | Partisipatif |
| 2024             | 2.353.387.157.089,76 | 2.979.896.625.006,00          | 78,97                 | Delegatif    |
| 2025             | 2.673.813.507.802,00 | 2.754.541.223.000,00          | 97,07                 | Delegatif    |
| <b>Rata-rata</b> |                      |                               | 81,73                 | Delegatif    |

Sumber: Diolah penulis (2026) Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023-2025, BPKAD Kabupaten Sidoarjo <https://bpkad.sidoarjokab.go.id/web/>

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan,

serta pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber pendapatan daerah sendiri. Tingkat kemandirian keuangan daerah bisa

dilihat dari seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan sumber pendapatan lain seperti dana yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pinjaman yang didapat oleh daerah tersebut. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah, semakin rendah ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat.

Berdasarkan Tabel 5, rasio kemandirian keuangan Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023 sebesar 69,15% dengan kriteria partisipatif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah mampu membiayai sebagian besar kegiatan pemerintahan dan pembangunan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun masih terdapat ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Pada tahun 2024 rasio kemandirian meningkat menjadi 78,97% dan masuk dalam kategori delegatif. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap

pendapatan daerah semakin besar sehingga ketergantungan terhadap dana transfer semakin berkurang.

Selanjutnya pada tahun 2025 rasio kemandirian kembali meningkat menjadi 97,07% dan tetap berada dalam kategori delegatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo semakin baik dan pemerintah daerah memiliki tingkat kemandirian yang tinggi dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Secara keseluruhan rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo selama periode 2023–2025 sebesar 81,73% yang termasuk dalam kategori delegatif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan yang cukup baik dalam mengelola sumber pendapatan daerah sehingga ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat relatif rendah.

### Rasio Efektivitas

**Tabel 6. Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023-2025**

| Tahun            | Realisasi PAD        | Target PAD           | Rasio Efektivitas (%) | Kriteria       |
|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>2023</b>      | 2.050.788.676.962,07 | 1.913.135.627.969,00 | 107,20                | Sangat Efektif |
| <b>2024</b>      | 2.353.387.157.089,76 | 2.118.076.054.462,00 | 111,10                | Sangat Efektif |
| <b>2025</b>      | 2.673.813.507.802,00 | 2.400.000.000.000,00 | 111,41                | Sangat Efektif |
| <b>Rata-rata</b> |                      |                      | 109,90                | Sangat Efektif |

Sumber: Diolah penulis (2026) dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023-2025, BPKAD Kabupaten Sidoarjo (<https://.bpkad.sidoarjo.go.id>)

Berdasarkan hasil perhitungan, rasio efektivitas Kota Sidoarjo selama periode 2022-2025 selalu menunjukkan diatas diangka 100% dengan rata-rata

110,21%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya selalu mencapai batas target yang telah ditetapkan,

sehingga termasuk dalam kategori sangat efektif. Pada tahun 2023 terlihat rasio efektivitas PAD mencapai angka 107,20 yang menunjukkan bahwa realitas pendapatan daerah melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini menandakan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam menggali sumber PAD sudah berjalan dengan baik. Pencapaian ini menandakan bahwa adanya potensi pendapatan yang cukup besar serta kemampuan pengelolaan yang optimal. Selanjutnya, pada tahun 2024 rasio efektivitas ini meningkat menjadi 111,10%. Kenaikan ini menunjukkan bahwa adanya perbaikan kinerja dalam pengelolaan PAD di bandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah daerah sangat efektif dalam mengelola penerimaan dari setbagai sumber, seperti pajak daerah dan retribusi. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas administrasi dan tata kelola keuangan daerah, dimana dalam hal

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendapatan. Meningkatkan rasio efektivitas ini juga menunjukkan adanya kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang semakin baik dalam memenuhi pembayaran pajak. Pada tahun 2025, rasio efektivitas mengalami peningkatan lagi menjadi sekitar 111,41%. Hal ini menunjukkan bahwa tren kinerja PAD terus mengalami perbaikan yang cukup signifikan dan konsisten. Realisasi yang sellu melampaui target mengindikasikan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mancapai. Secara keseluruhan, rasio efektivitas PAD tahun 2023-2025 menunjukkan tren meningkat dan stabil di atas 100% sehingga termasuk dalam kategori sangat efektif. Dari rasio yang meningkat menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah yang sangat baik dalam mengelola pendapatan.

**Rasio Efisiensi**

**Tabel 7. Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023-2025**

| Tahun            | Realisasi Total Pendapatan | Realisasi Total Belanja | Rasio Efisiensi | Kriteria       |
|------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|
| <b>2023</b>      | 5.020.195.449.420,07       | 5.001.777.999.928,70    | 100,37          | Tidak Efisien  |
| <b>2024</b>      | 5.333.383.466.334,81       | 5.251.342.990.301,47    | 98,46           | Kurang Efisien |
| <b>2025</b>      | 5.947.354.730.802,00       | 5.947.354.730.802,00    | 100,00          | Seimbang       |
| <b>Rata-rata</b> |                            |                         | 99,61           | Kurang Efisien |

Sumber: Diolah penulis (2026) dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023-2025, BPKAD Kabupaten Sidoarjo (<https://.bpkad.sidoarjo.go.id>)

Rasio efisiensi Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2023-2025 menunjukkan kondisi yang cenderung fluktuatif namun mulai membaik. Pada tahun 2023, rasio efisiensi sebesar

100,3% yang menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah sedikit lebih sesar dibandingkan dengan pendapatan, sehingga masuk kategori tidak efisien. Pengelolaan anggaran

masih belum optimal dan tidak seimbang antara pendapatan dan pengeluaran daerah. Masuk pada tahun 2024, rasio efisiensi ini mengalami penurunan sebesar 98,46%, yang menunjukkan bahwa adanya perbaikan dari pemerintah dalam pengendalian belanja daerah. Meskipun tergolong masih kurang efisien, kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai mampu mengatur pengeluaran agar lebih seimbang dengan pendapatan daerah. Penurunan ini mencerminkan adanya peningkatan efisiensi dlm penggunaan anggaran.

Pada tahun 2025, rasio efisiensi berada pada angka 100,00%, yang menunjukkan kondisi seimbang antara pendapatan dan belanja daerah.

Pemerintah menunjukkan bahwa adanya keberhasilan dalam upaya stabilitas keungan, meskipun efisiensi yang optimal masih belum dibawah 100,00% belum sepenuhnya tercapai. Kondisi ini memungkinkan bahwa pemerintah melakukan perencanaan anggaran yang lebih hati-hati agar tidak terjadi defisit yang signifikan. Rasio efisiensi tahun 2023-2025 memberikan gambaran adalah perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, meskipun belum sepenuhnya efisiensi. Oleh karena itu, diperlukan upaya lanjutan dalam pengendalian belanja daerah agar lebih seimbang dan mampu meningkatkan efisiensi yang optimal.

#### **Rasio Pertumbuhan**

**Tabel 8. Rasio Pertumbuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023-2025**

| Tahun            | Realisasi PADt1      | Realisasi PADt0      | Rasio Pertumbuhan (%) |
|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>2023</b>      | 2.050.788.676.962,07 | 1.801.982.663.587,19 | 13,81                 |
| <b>2024</b>      | 2.353.387.157.089,76 | 2.050.788.676.982,07 | 14,75                 |
| <b>2025</b>      | 2.673.813.507.802,00 | 2.353.387.157.089,76 | 13,61                 |
| <b>Rata-rata</b> |                      |                      | <b>14,06</b>          |

Sumber: Diolah penulis (2026) dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023-2025, BPKAD Kabupaten Sidoarjo (<https://.bpkad.sidoarjo.go.id>)

Berdasarkan Tabel 8, rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023 sebesar 13,81%. Pada tahun 2024 rasio pertumbuhan mengalami peningkatan menjadi 14,75%. Kemudian pada tahun 2025 rasio pertumbuhan sebesar 13,61%. Meskipun pada tahun 2025 terjadi sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, secara umum PAD Kabupaten Sidoarjo tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif. Rata-rata

rasio pertumbuhan PAD selama periode 2023–2025 sebesar 14,06%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tergolong cukup baik. Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan realisasi anggaran yang telah dicapai dari tahun ke tahun berikutnya. Selain itu, adanya perhitungan pertumbuhan pada

sumber pendapatan daerah dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk melihat potensi pendapatan yang perlu ditingkatkan pada periode berikutnya. Dengan demikian, analisis rasio pertumbuhan dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan kinerja keuangan daerah, baik dari sisi peningkatan pendapatan maupun dalam upaya optimalisasi pengelolaan keuangan daerah.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2023–2025, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan APBD secara umum menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini terlihat dari rasio kemandirian keuangan daerah yang terus mengalami peningkatan dari kategori partisipatif menjadi delegatif dengan rata-rata sebesar 81,73%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin mampu membiayai kebutuhan daerahnya secara mandiri dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin berkurang. Dari sisi efektivitas, kinerja keuangan daerah tergolong sangat efektif dengan rata-rata rasio efektivitas sebesar 109,90%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan yang baik dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. Namun demikian, dari sisi efisiensi, pengelolaan keuangan daerah masih

belum optimal. Rasio efisiensi yang berada pada rata-rata 99,61% menunjukkan bahwa penggunaan anggaran masih tergolong kurang efisien, karena besarnya belanja daerah hampir sebanding bahkan melebihi pendapatan pada beberapa tahun tertentu. Hal ini menandakan bahwa masih diperlukan upaya pengendalian belanja agar penggunaan anggaran menjadi lebih efektif dan tidak berlebihan. Sementara itu, rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren yang positif dengan rata-rata sebesar 14,06%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan terus berkembang dari tahun ke tahun. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Sidoarjo sudah cukup efektif, mandiri, dan mengalami pertumbuhan yang baik, namun masih perlu adanya peningkatan dalam pengelolaan belanja daerah agar lebih efisien sehingga tercapai keseimbangan keuangan yang lebih optimal dan berkelanjutan.

### **REFERENSI**

- Aithan, I., Frinaldi, A., & Putri, N. E. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintahkabupaten Solok Berdasarkan Apbd Tahun 2024. *Jurnal Ekonomi Dan Administrasi Modern*, 9(2).
- Amsyah, U., & Sudardi, S. (2025). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dalam era desentralisasi indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen*,

- Bisnis Dan Ekonomi (JIMBE)*, 3(1), 14–27.
- Andy Alfatih (2021). Panduan Praktis Penelitian Deskriptif Kuantitatif. Sriwijaya University Ripository
- Andi Nurwana, Agus Purwanto, Akbar (2023). *Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Desa Leppangeng Kabupaten Bone*. *Journal of Economic*, 2(1).
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo. (2025). *Profil dan informasi pengelolaan keuangan daerah*.
- Bulo, Y. (2017). *Analisis kemandirian keuangan daerah*.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. (2024). *Tinjauan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2022–2024*. Di
- Disma Suci Rohmadani, Henny Yulsiati, Yuliana Sari (September, 2024). *Pengaruh Kemandirian Keuangan dan Rasio Utang terhadap Keberlanjutan Finansial pada Provinsi di Indonesia*. *JURNAL MANEKSI*, 13(3).
- Handraini, H., Frinaldi, A., Asnil, A., & Putri, N. E. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Danaperimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintahan Daerah Di Kab. Pasaman Barat. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(2), 593–600.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba
- Empat.
- Hapsari, M. T., dkk. (2023). *Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Hardini, M. (2017). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 5(1).
- lin Ivanda Listari, Kukuh Harianto, Trisnia Widuri (September, 2022). *ANALISIS RASIO EFEKTIVITAS, RASIO EFISIENSI, DAN RASIO KEMANDIRIAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA (2018-2021)*. *JURNAL MAJASISWA: Jurnal Ilmiah Penalaran dan Penelitian Mahasiswa*, 4(3).
- Institut Pemerintahan Dalam Negeri. (n.d.). *Ringkasan penelitian kinerja keuangan daerah*.
- Mahmudi. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi
- Maulidia, D. N. (2024). *Analisis rasio keuangan untuk mengukur kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2019–2023*. *Jurnal Nirta: Studi Inovasi*, 4(1).
- Repository UNISI. (n.d.). *Kemandirian keuangan daerah*.
- Triarda, R., & Damayanti, R. (2021). Analisis optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan

pendapatan asli daerah Kota  
Malang. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu  
Pemerintahan*, 6(1), 35–54.

Universitas Atma Jaya Yogyakarta.  
(n.d.). *Analisis kinerja keuangan  
pemerintah daerah*.